

ANALISIS MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh :

WAHYU KURNIAWAN
NIM. 11970510666

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta
 Nama
 Nim
 Program Studi
 Fakultas
 Judul

: Wahyu Kurniawan
 : 11970510666
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Model Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mahato
 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber yang menginspirasi.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Kurniawan
 NIM : 11970510666
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Analisis Model Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
 Tanggal Ujian : 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

Penguji I
 Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA

Penguji II
 Irdyanti, S.SIP., M.A.

Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAHYU KURNIAWAN
 NIM : 11970510666
 Tempat/Tgl. Lahir : Mahato, 07 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Model Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Ufara Kabupaten Rokan Hulu."

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



Kurniawan.

NIM :

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Analisis Model Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Oleh : Wahyu Kurniawan

NIM. 11970510666

Desa mahato merupakan salah satu desa yang ada di Riau dengan tingkat partisipasi warga yang rendah dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kehadiran warga dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Masalah lain yang mengemuka adalah lemahnya loyalitas warga terhadap kepemimpinan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa relasi peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa mahato. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap key informan kepala desa mahato, sekretaris desa mahato, kepala urusan keuangan desa mahato, kepala dusun dan masyarakat. Pengambilan data juga dilakukan melalui observasi dengan cara mengamati dan mengidentifikasi sikap, interaksi antar warga dan kepala desa dan mengamati berbagai dokumentasi pemerintah desa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi Kepala Desa Mahato memiliki komunikasi yang tidak efektif dengan warga dalam mengelola informasi terkait dengan program dan pembangunan, Ketidakmampuan kepala desa untuk berpikir secara inovatif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada telah menyebabkan tingkat loyalitas warga terhadap partisipasi dalam proses pembangunan menjadi rendah.

Kata Kunci: *Kepemimpinan; Partisipasi; Pembangunan Desa.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Analysis of the Leadership Model of Village Heads in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency

Oleh : Wahyu Kurniawan

NIM. 11970510666

Mahato Village is one of the villages in Riau with a low level of citizen participation in development. This can be seen from the low presence of residents in village development planning deliberations (Musrenbangdes). Another problem that has emerged is the weak loyalty of residents towards the leadership of the village head. This research aims to analyze the relationship between the leadership role of the village head in increasing community participation in development in Mahato village. This research was conducted using a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews with key informants, Mahato village head, Mahato village secretary, Mahato village financial affairs head, hamlet head and the community. Data collection was also carried out through observation by observing and identifying attitudes, interactions between residents and village heads and observing various relevant village government documentation. The results of the research show that the Mahato Village Head's communication pattern has ineffective communication with residents in managing information related to programs and development. The village head's inability to think innovatively in identifying existing needs and problems has caused the level of residents' loyalty towards participation in the development process to decrease. low.

Keywords: Leadership; Participation; Village Development.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, karunia, hidayah, dan inayah-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul "*ANALISIS MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU*". Selanjutnya skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ngadino dan Ibunda Warsinah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk merasakan manisnya kasih dan sayang, terima kasih telah berjuang untuk setiap langkah di kehidupan penulis dengan penuh kesabaran, ketabahan, cinta, dan do'a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih selalu memberikan motivasi untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Terima kasih kepada abang dan kaka terhebat yang sangat penulis sayangi, Nur Dewi Widya Ningsih dan Ramadhani yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat serta selalu mendengarkan cerita penulis. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, abang dan kakak yang sangat penulis sayangi dan penulis syukuri kehadirannya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus juga menjadi Dosen Pembimbing bagi penulis
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



7. Kepada Kepala Desa Mahato, Staff Desa Mahato, BPD Desa Mahato, Perangkat Desa Mahato dan Masyarakat Desa Mahato yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

8. Kepada Keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Kepada Sahabat penulis yang terbaik Suprianto yang sudah kebersamai dari awal kuliah, PKL, KKN, Sidang proposal dan pengerjaan skripsi secara bersama-sama.

10. Teman-teman seperjuangan lokal F angkatan 19 Administrasi Negara yang telah kebersamai penulis dalam berjuang, memberikan motivasi, dan menjadi contoh yang baik bagi penulis

11. Rohis ISC Al-Iqtishodi FEIS UIN Suska Riau, Forum Diskusi Ekonomi Islam UIN Suska Riau, Forum Silaturahmi Study Ekonomi Islam Sumatera Bagian Tengah, Study Club Dinamika Publik dan HMPS Administrasi Negara yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu lebih dalam serta menjadi wadah bagi penulis untuk mencari pengalaman

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargakan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya. Aamiin allahumma aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

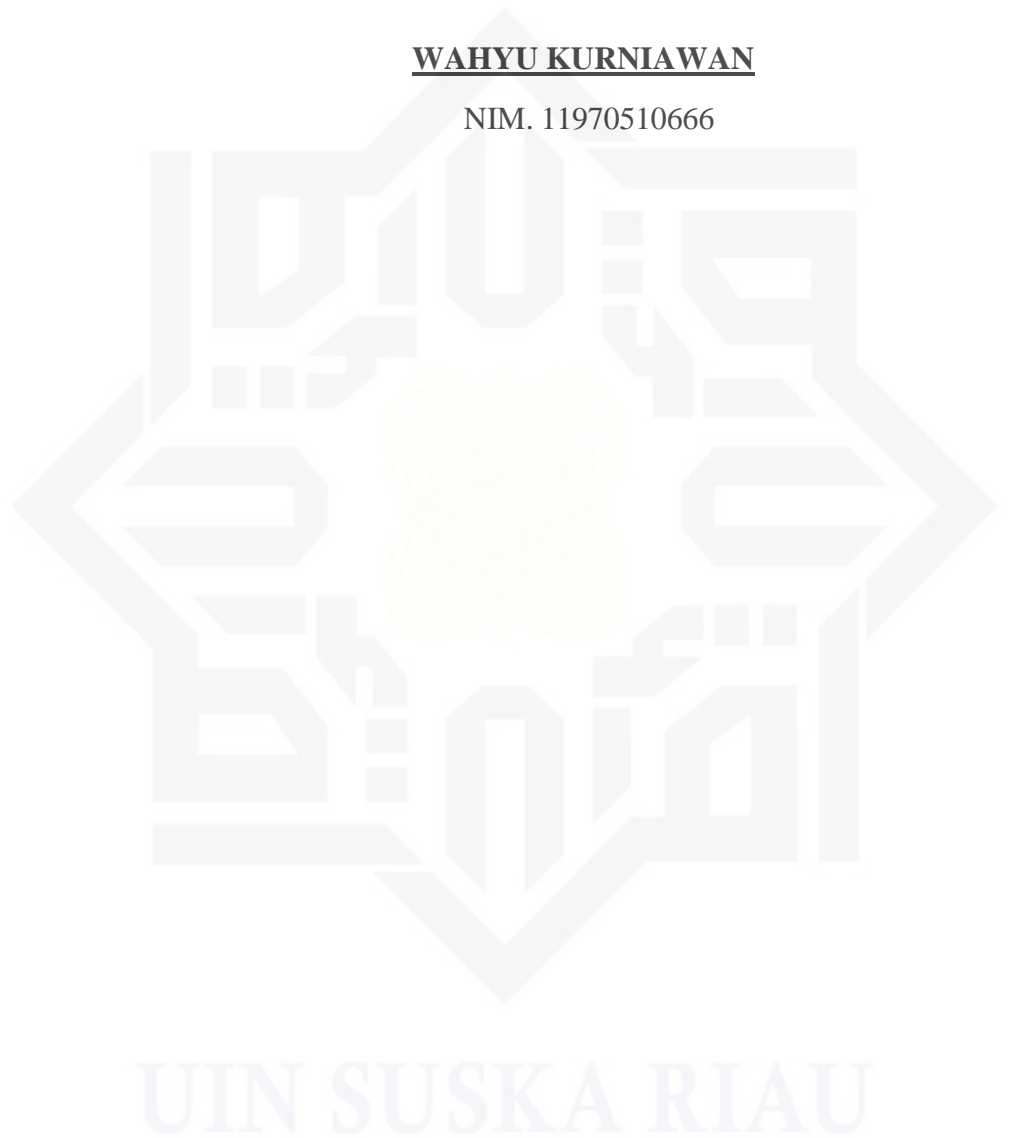
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Agustus 2023

Penulis

WAHYU KURNIAWAN

NIM. 11970510666



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KAJIAN TEORI	16
2.1 Konsep Kepemimpinan.....	16
2.2 Teori Kepemimpinan	23
2.3 Konsep Kepala Desa	26
2.4 Teori Partisipasi Masyarakat.....	36
2.1 Teori Pembangunan	39
2.6 Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam.....	41
2.7 Penelitian Terdahulu	44
2.8 Konsep Operasional	51
2.9 Kerangka Berpikir.....	52
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	53
3.3 Sumber Data.....	53
3.4 Informan Penelitian.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV	58
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	58
4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	58
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu	60
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu	61
4.2 Gambaran Umum Desa Mahato.....	62
4.2.1 Deskripsi Desa Mahato	62
4.2.2 Kependudukan Desa Mahato	64
4.2.3 Keadaan Sosial dan Budaya	65
4.2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Mahato	66
BAB V.....	73
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	73
5.1 Inovator	73
5.1.1. Kemampuan Kepala Desa Melakukan Inovasi	73
5.1.2. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengkonsep.....	80
5.2 Komunikator	84
5.2.1. Kemampuan Kepala Desa Menyampaikan Pesan nformasi.....	84
5.2.2. Kemampuan Kepala Desa Memahami Keinginan Masyarakat	99
5.3 Motivator.....	101
5.3.1. Kemampuan Kepala Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat	101
5.4 Kontroller.....	121
5.4.1. Kemampuan Kepala Desa Dalam Melakukan Pengawasan.....	121
5.4.2. Kemampuan Kepala Desa Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Desa ...	127
BAB VI.....	131
KESIMPULAN DAN SARAN	131
6.1 Kesimpulan	131
6.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Informasi Laporan Realisasi APBDesa.....	94
Gambar 5.2 Absensi Musrenbangdes Mahato 2023.....	111
Gambar 5.3 Dokumentasi Musrenbangdes 2023.....	112
Gambar 5.4 Daftar Kegiatan Prioritas Desa Mahato.....	115
Gambar 5.5 Daftar Kegiatan Prioritas Desa Mahato.....	115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Bangunan Fisik Desa Mahato.....	3
Tabel 1.2 Daftar Hadir Musrenbangdes 2022.....	9
Tabel 1.3 Kegiatan Gotong Royong.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	52
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Dusun di Desa Mahato.....	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan (Kaehe et al., 2019). Seperti yang dikemukakan oleh Riyadi (2013) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sesuai dengan pendapat di atas, maka menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi : “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumberdaya pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan (Ajamsaru et al., 2016). Pada pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Londa et al., 2021). Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di perdesaan. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap pembangunan di desa, berdasarkan pada kenyataan bahwasannya desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa serta masyarakat desa, merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia (Jamaludin, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan guna mempercepat pembangunan perdesaan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya manusia yang efektif (Murdiyana & Mulyana, 2017). Secara keseluruhan, ini adalah aktivitas masyarakat yang bergerak ke arah yang lebih baik. Karena bahwasanya pembangunan itu dimulai dari masyarakat, dan memang diarahkan pada masyarakat itu sendiri (Nutvi et al., 2022).

Desa Mahato merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Keadaan yang terjadi di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada saat ini dimana peran Kepala Desa sebagai pemimpin dalam bidang pembangunan kurang terwujud secara baik, kurangnya pengkoordinasian Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah di rencanakan dan dilaksanakan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa bentuk pembangunan yang dilaksanakan di desa Mahato sebagaimana tercantum didalam data berikut :

Tabel 1.1 Daftar Bangunan Fisik di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

No	Rencana Pembangunan	Anggaran	Target	Realisasi	Tidak Terealisasi
1.	Gedung BPD	146.509.000	6 x 8 m	6 x 8 m	-
2.	Drainase Sp.Badak	167.450.700	300 m	300 m	-
3.	Semenisasi Jalan Dusun 1	150.000.000	500 m	-	Semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

4.	Pembangunan Jembatan RT 007 Danau Bawah	85.000.000	5 m	-	Semua
5.	Pembangunan Boxculver	500.000.000	10 Unit	-	Semua
6.	Pembangunan Papin Blok Masjid RT 010	80.000.000	200 m	-	Semua
7.	Pembangunan Kantor Kepala Dusun	150.000.000	1 Unit	-	Semua
8.	Pembangunan MCK Pasar Dusun	25.000.000	2 Unit	-	Semua
9.	Pembangunan Pagar Mushala	50.000.000	100 m	-	Semua

Sumber : Kantor Kepala Desa Mahato, 2022

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) pembangunan yang mencapai target 100% dari apa yang sudah direncanakan. Sedangkan sisanya tidak terealisasi sama sekali pada proses pelaksanaannya. Dalam hal ini tentunya peran dari Kepala Desa Mahato sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, khususnya pada pembangunan yang tidak mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan. Kepala desa juga bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur.

Kepemimpinan Kepala Desa berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat (Rati et al., 2017). Salah satu faktor yang sangat menentukan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu adanya kepemimpinan kepala desa. Dalam konteks ini kepemimpinan kepala desa diharapkan mampu menjembatani dan memfasilitasi masyarakat untuk terlibat



aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Kepemimpinan kepala desa dinilai memiliki hubungan dalam peningkatan partisipasi masyarakat mengingat bahwa kepala desa memiliki power untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya (Rismayana, 2021).

Jika dicermati bahwa kepemimpinan kepala desa pada dasarnya merupakan kemampuan kepala desa untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain atau masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama (Lamida, 2015). Dalam konteks ini kepemimpinan kepala desa merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut dalam hal ini masyarakat untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Aisia, 2017).

Sebagai pemimpin di desa kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Pasal 101 UU No. 32 Tahun 2010 tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan tugas dan kewajiban kepala desa adalah: a) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, b) membina kehidupan masyarakat desa, c) membina perekonomian desa, d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, f) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa dalam mengaktualisasikan kepemimpinannya sebagai kepala desa harus selalu merujuk pada tata aturan hukum sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut.

Kepemimpinan kepala desa harus dilakukan sepenuhnya untuk mengaktualisasikan tugas-tugasnya sehingga peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya dapat terwujud dengan baik (Andika et al., 2021). Dalam upaya mewujudkan tugas-tugasnya sebagai kepala desa tersebut, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga cita-cita yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa dapat diwujudkan secara optimal (Agung Arishandy & Sukmana, 2023).

Dengan adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepala desa maka sangat memudahkan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepala desa maka sangat memudahkan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat (Ferlina, 2020). Uraian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat diperlukan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kurangnya hubungan Kepala Desa secara persuasif dengan seluruh masyarakat di desa. Hal ini menyebabkan kurangnya proses komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa mahato. Kemudian kemampuan kepala desa dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi yang ada di desa kepada masyarakat juga turut menjadi sebuah catatan yang harus diperhatikan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan bersama dengan aparatur yang terlibat. Hal ini ditandai dengan tidak adanya akses yang disediakan untuk memperoleh informasi terkait rencana program, rencana pembangunan dan realisasinya baik berupa informasi secara lisan maupun berupa baliho.

Seorang kepala desa harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan desa. Visi yang jelas akan memberikan arah yang tepat bagi kepala desa dalam mengembangkan program-program yang berkelanjutan untuk masyarakat (Muqsith et al., 2022). Dengan membagikan visi ini kepada masyarakat, kepala desa dapat menginspirasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan rasa memiliki terhadap program-program tersebut, sehingga meningkatkan komitmen mereka untuk mencapai tujuan bersama (Hadiyanti, 2008).

Selain memiliki visi yang jelas, kepala desa juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik (Andarista & Kriswibowo, 2023). Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membuka dialog yang positif antara kepala desa dan masyarakat. Seorang kepala desa yang mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat dengan baik akan mendorong partisipasi aktif. Dia harus membuka ruang bagi warga desa untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan masalah, ide, dan saran mereka. Melalui pertemuan rutin, diskusi terbuka, atau forum partisipatif, kepala desa dapat membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam proses pembangunan (Fremias Wenda, Burhanuddin Kiyai, 2021). Dalam konteks ini, penting bagi kepala desa untuk memfasilitasi inklusivitas dan menghargai keragaman pendapat dalam masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan meningkat, karena mereka merasa didengar dan memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berperan sangat penting terhadap pembangunan desa dan juga partisipasi masyarakat secara langsung. Menurut Rivai (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015: 149), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga (Rakhmawati, 2016). Aktualisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan.



Adapun model kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa adalah Gaya kepemimpinan Partisipatif (Andika et al., 2021). Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Yukl, 1998:102). Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis (Podungge & Monoarfa, 2019). Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota masyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa Mahato berupaya menerapkan pola kepemimpinan partisipatif dengan menjemput aspirasi masyarakat seperti melakukan Safari Ramadhan dan silaturahmi dengan tokoh dan juga masyarakat dengan menyelenggarakan pesta rakyat kemudian Gebyar PBB-P2 dalam rangka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membayar pajak.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam suksesnya pembangunan (Kaehe et al., 2019). Sebab permasalahan dan kegagalan dalam proses pembangunan dapat terjadi disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut Kartasmita (dalam Solekhan, 2012:140) mengemukakan bahwa kegagalan pembangunan dalam menuntaskan permasalahan sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya partisipasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Conyers (dalam Solekhan, 2012:21) bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu : Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya dalam pembangunan akan gagal, 2) Masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, 3) Dalam perspektif demokrasi, partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Menurut Yadav (dalam Theresia, 2014:198) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan terbagi atas empat macam yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam bentuk lain, Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi: 1) sumbangan pikiran (ide atau gagasan) 2) sumbangan materi (dana, barang dan alat) 3) sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja) 4) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan. Salah satunya dengan memperhatikan cara pemimpin dalam memimpin masyarakat tersebut.

**Tabel 1.2 Jadwal Agenda Musrenbang Desa Mahato 2019-2023**

No	Agenda	Peserta	Jadwal
1.	Musrenbangdes 2019	75 Orang	16 Januari
2.	Musrenbangdes 2020	52 Orang	8 Januari
3.	Musrenbangdes 2021	43 Orang	6 Januari
4.	Musrenbangdes 2022	35 Orang	9 Januari
5.	Musrenbangdes 2023	43 Orang	17 Januari

Sumber : Kantor Desa Mahato 2023

Berdasarkan tabel diatas di desa mahato sendiri jika dilihat tingkat partisipasi masyarakat juga tergolong masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dari tahun ke tahun. Pada hasil pengamatan penulis dalam pra penelitian bahwa Keterlibatan masyarakat di Desa Mahato dalam berpartisipasi atas perencanaan pembangunan desa, terutama terlihat dari berbagai tahapan dalam perencanaan pembangunan desa melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa relative masih sangat kurang. Bahkan dari data dokumen notulen rapat dalam pertemuan musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan ternyata antusiasme tokoh masyarakat yang diundang dalam musrenbang tersebut tidak mencapai 50% kehadiran dari 100 orang yang seharusnya hadir dan diundang didalam musyawarah, bahkan kehadirannya tidak mengikuti pertemuan sampai selesai, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka.

Kemudian unsur masyarakat peserta Musrenbangdes yang seharusnya memiliki perwakilan masyarakat yang berasal dari setiap dusun yang berbeda di 9 (sembilan) dusun yang ada di desa mahato akan tetapi kehadiran dari setiap kegiatan musyawarah justru hanya di dominasi oleh dusun 1 yang kebetulan berada di pusat kantor desa. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat dusun Rio Makmur adapun yang melatar belakangi hal demikian adalah jauhnya jarak tempuh yang harus diakses oleh masyarakat desa dengan kondisi jalan yang belum baik jika dibandingkan dengan kondisi jalan yang ada di pusat desa. Sehingga masyarakat tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam musyawarah yang diadakan di balai pertemuan kantor desa mahato tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan desa belum menunjukkan peran optimal dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepala desa kurang memberi perhatian terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan tidak ada inovasi terkait dengan hal tersebut. Sementara jika dicermati bahwa salah satu tugas utama kepala desa adalah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan di desa (Hakim et al., 2018). Terkait dengan kondisi riil tersebut diduga bahwa kepala desa perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan sehingga mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa (Madani et al., 2023.).

Kemudian partisipasi masyarakat dalam bergotong royong juga turut berperan penting dalam pembangunan desa. Gotong royong yang juga merupakan ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu atau kelompok sosial (Ridwan, 2013). Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya (Widjaja, 2004 : 76). Berikut merupakan data kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat yang ada di Dusun 2 Desa Mahato :

Tabel 1.3 Kegiatan Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat Dusun 2

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan	Partisipasi
1.	Gotong Royong Lapangan	Terlaksana	18 Orang
2.	Gotong Royong Pembangunan Masjid	Terlaksana	11 Orang
3.	Gotong Royong Perbaikan Jalan	Tidak Terlaksana	-
4.	Gotong Royong Pembuatan parit Jalan	Tidak Terlaksana	-
5.	Gotong Royong Jembatan	Tidak Terlaksana	-
6.	Ronda Malam	Tidak Terlaksana	-

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bergotong royong masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan, jika dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah KK yang ada di Dusun 2 Sebesar 409



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KK maka masyarakat masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Oleh karena diharapkan kepada kepala desa agar berusaha mengajak seluruh elemen dilaksanakan agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan guna mempercepat pembangunan tersebut. Disamping itu, kepala desa harus mampu membuat gagasan agar dapat menarik kepedulian masyarakat terhadap pembangunan didesa tersebut.

Dari gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Model Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian paparan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”.

1. Adapun alasan peneliti memilih judul penelitian seperti di atas adalah :
 - a. Persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan bidang ilmu yang sedang penulis pelajari, yaitu manajemen Administrasi Negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Masalah-masalah yang dikaji di dalam judul penelitian ini, penulis mampu untuk menelitinya.
- c. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pemerintah, sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya mengevaluasi pemekaran daerah otonomi baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pendidikan, sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai kepemimpinan kepala desa.
 3. Masyarakat, sebagai bahan informasi dan memberikan manfaat bagi Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- ### b. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya peranan kepala desa dan komunikasi organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami.

Adapun Sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, Definisi konsep, konsep operational, Pelayanan administrasi publik dalam pandangan islam serta kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan tentang sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek penelitian, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi objek penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran yang relevan untuk penelitian berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

Kepemimpinan merupakan suatu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas / kemampuan pribadi, yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan, Solekhan (2012:59). Jadi sangat pentingnya kinerja kepemimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak pada pengertian kepemimpinan seperti disebut diatas, maka seorang pemimpin itu dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Lebih dari pada itu, seorang pemimpin itu juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka dipandang penting seorang pemimpin itu untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadiannya melalui pembinaan watak (character building), Solekhan (2012:60). Jadi kinerja kepemimpinan merupakan inti dari manajemen yang merupakan motor penggerak sumber daya dan fungsi manajemen serta alat lainnya.



Sementara kepemimpinan itu sendiri secara definisi adalah merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kartini, Kartono (1990: 38-39). Sedangkan menurut Stoner kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya, Bukhori, Muhammad, dkk (2005: 73) Sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai angka produktifitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Siswanto, Bedjo (2006: 310). Di lain pihak Gibson dkk, mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan, factor manusialah yang menggabungkan kelompok menjadi satu dan merencanakan mengorganisasikan dan membuat keputusan adalah kepompong yang sedang tidur, sampai seorang pemimpin memicu kekuatan motivasi dalam diri orang-orang dan membimbing mereka ke arah sasaran, Gibson dkk (1997: 3) pekerjaan serta tanggung jawan atas kepemimpinannya tersebut dengan baik, Robert C. Miljus dalam bukunya Human Relation On The Shop Flor mengemukakan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai berikut: member motivasi kelompok itu menuju sasaran. Kegiatan manajemen seperti :

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan dan lain sebagainya).
- b. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diharapkan dari mereka.
- d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
- e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
- g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
- h. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 318-319).

Menurut C.N. Cooley (1902), The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be



found to consist of tendencies having such nucleus. Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo (2003: 83) dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi : “menggerakkan, mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya”. Dari kata tersebut dapat dirumuskan memimpin mengandung makna yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang. Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Apakah orang-orang dalam masyarakat atau organisasi tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? Pemimpin diperlukan, sedikitnya terdapat empat macam alasan: (a) karena banyak orang memerlukan figur pemimpin, (b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu tampil mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan (d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.

Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Kahn (dalam Watkin, 1992) berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yakni “sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”. Pengertian kepemimpinan sebagai atribut atau kelengkapan suatu kedudukan, diantaranya dikemukakan oleh Janda (dalam Yukl, 1989) sebagai berikut. “Leadership is a particular type of power relationship characterized by a group member’s perception that another group member has the right to prescribe behavior patterns for the former regarding his activity as a group member”. (Kepemimpinan adalah jenis khusus hubungan kekuasaan yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok bahwa seorang dari anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota kelompok, pen.).

Adapun contoh pengertian kepemimpinan sebagai perilaku dikemukakan oleh Sweeney dan McFarlin (2002) yakni: “Leadership involves a set of interpersonal influence processes. The processes are aimed at motivating sub-ordinates, creating a vision for the future, and developing



strategies for achieving goals”, yang dapat diartikan bahwa kepemimpinan melibatkanseperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan ketiga kategori pengertian di atas, Watkins (1992) mengemukakan bahwa “kepemimpinan berkaitan dengan anggota yang memiliki kekhasan dari suatu kelompok yang dapat dibedakan secara positif dari anggota lainnya baik dalam perilaku, karakteristik pribadi, pemikiran, atau struktur kelompok”. Pengertian ini tampak berusaha memadukan ketiga kategori pemikiran secara komprehensif karena dalam definisi kepemimpinan tersebut tercakup karakteristik pribadi, perilaku, dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut maka teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, dan kedudukan yang dipandang lebih daripada individu lain dalam suatu kelompok sehingga individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut untuk bertindak ke arah pencapaian suatu tujuan.

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitasaktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pwngikut, (2) kepemimpinan melibatkan pen distribusi kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan oraganisasi, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu, pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kemampuan untuk mempengaruhi



suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara formal maupun tidak formal. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan.

Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal.

2.2 Teori Kepemimpinan

Pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, salah satunya adalah teori perilaku (behaviour theory) Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi dan/atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Perilaku dan tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai dua hal berbeda tetapi saling bertautan, yakni (1) fokus terhadap penyelesaian tugas (pekerjaan) atau task/production-centered; dan (2) fokus pada upaya pembinaan terhadap personil yang melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut (people/employee-centered).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan merupakan yang memiliki orientasi yang terdiri dari:

1. Orientasi pada tugas
2. Orientasi pada tugas dan barang

Balke dalam (Mawarni) menyimpulkan bahwa himpunan yang efektif atau yang mampu mengefektifkan dapat diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pemerintah. Lewin, Lippitt, dan White (Dunford, 1995), pada tahun 30-an melakukan studi terkait dengan tingkat keketatan pengendalian, dan melahirkan terminologi gaya kepemimpinan autocratic, democratic, dan laissez-faire.

1. Kepemimpinan otoriter merujuk kepada tingkat pengendalian yang tinggi tanpa kebebasan dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bersifat otoriter, tidak bersedia mendelegasikan wewenang dan tidak menyukai partisipasi anggota.
2. Kepemimpinan demokratis merujuk kepada tingkat pengendalian yang longgar, namun pemimpin sangat aktif dalam menstimulasi diskusi



kelompok dan pengambilan keputusan kelompok, kebijakan atau keputusan diambil bersama, komunikasi berlangsung timbal balik, dan prakarsa dapat berasal dari pimpinan maupun dari anggota.

3. Kepemimpinan laissez-faire, menyerahkan atau membiarkan anggota untuk mengambil keputusan sendiri, pemimpin memainkan peran pasif, dan hampir tidak ada pengendalian/pengawasan, sehingga keberhasilan organisasi ditentukan oleh individu atau orang per orang.

Selanjutnya House & Mitchell (Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, 2000) mengembangkan Path Goal Theory. Menurut teori ini, pemimpin harus meningkatkan ketersediaan jumlah dan jenis penghargaan bagi pegawai; dan selanjutnya memberikan petunjuk dan bimbingan untuk menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Berdasarkan tindakan pimpinan dalam memotivasi dan memberikan penjelasan kepada pegawai maka dikenal adanya kepemimpinan directive, supportive, participative, dan achievement oriented.

1. Kepemimpinan direktif, yakni pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas; tidak ada ruang untuk diskusi dan partisipasi pegawai.
2. Kepemimpinan suportif, menempatkan pemimpin sebagai “sahabat” bagi bawahan, dengan memberikan dukungan material, finansial, atau moral; serta peduli terhadap kesejahteraan pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kepemimpinan partisipatif, dalam mengambil keputusan dan/atau bertindak meminta dan menggunakan masukan atau saran dari pegawai, namun keputusan dan kewenangan tetap dilakukan oleh pimpinan.
4. Kepemimpinan berorientasi prestasi, menunjukkan pemimpin yang menuntut kinerja yang unggul, merancang tujuan yang menantang, berimprovisasi, dan menunjukkan kepercayaan bahwa pegawai dapat mencapai standar kinerja tinggi

Teori-teori dalam kategori ini juga dikembangkan oleh Blake dan Mouton (1964) yang disebut dengan Managerial Grid. Dalam kepemimpinan ini, kisi-kisi perhatian kepada pekerja dan kepada produksi diukur dalam skala terendah = 0 dan tertinggi = 9; sehingga skala 9,9 yang disebut tim manajemen dipandang sebagai gaya kepemimpinan yang paling optimal. Likert (1961-1967) juga mengembangkan pengukuran perilaku kepemimpinan yang dikelompokkan menjadi empat gaya yakni *exploitative authoritative*, *benevolent authoritative*, *consultative*, dan *participative group*. Selain itu masih banyak lagi teori-teori yang dikembangkan lebih lanjut berdasarkan orientasi perilaku pemimpin dalam memandang pelaksanaan tugas/produksi/kinerja, dan para pegawai sebagai pelaksana tugas tersebut.

2.3 Konsep Kepala Desa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut Ade Engkus Kusnadi (2007:4) mengatakan kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) oleh penduduk desa setempat.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketenteraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat diperbaiki seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan pada desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada



kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepala desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari Kepala Desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan.

Melihat tugas dan peranan yang diemban oleh Kepala Desa maka diperlukan kemampuan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat Saparin (1986:3) mengatakan, “setiap pemimpin harus memiliki beberapa kemampuan yaitu persepsi sosial, kemampuan berfikir abstrack dan keseimbangan sosial”.

Kewenangan kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya (leadership), mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya serta harus cakap dalam mewujudkan visi dan misi yang diembannya.

Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPC, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

1. Peran Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa diluar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat.
2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan gairah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

2. Peran Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002: 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil



tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugastugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru

2.4 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede “The Taking Part in one or more phase of the process” (partisipasi) berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses (Khairudin : 1992). Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Teori partisipasi adalah Teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini terkait dengan peran individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari keadaan di sekelilingnya. Pandangan dari beberapa ahli, sebuah proses keterlibatan diri seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang disepakati bersama adalah sebuah definisi partisipasi dari sudut pandang beberapa ahli. Teori partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi setara. Kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak yang saling berinteraksi bisa juga terhubung dengan partisipasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semakin banyak manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut, maka akan semakin kuat relasi diantaranya.

Menurut Beal (1964) partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen.

Sebagai suatu kegiatan, Verhagen (1979) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai (a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (c) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (d) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Yadav (UNAPDI, 1980) Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013, mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
- c. Partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantuan dan evaluasi program diperlukan bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai sesuai harapan namun juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam Nasution (2007: 14), pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Sedangkan Effendi (2002: 9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah.

Sesuai dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban dengan kapasitas hukum, peningkatan kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparatur negara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana. Dari uraian tersebut di atas, Suryadi (2000: 2) menyebutkan bahwa pembanguan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka di pergunakan teknik”untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar dupaya kegiatan dan respon yang antusias terjamin.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembaguanan itu meliputi pembaguan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual. Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru mengenai pembangunan, maka peneliti akan mengemukakan pendapat beberapa ahli antara lain Siagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Tjokroamidjojo (2001: 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan (B.S Muljana, 2001: 3). Pembangunan Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti: Jalan, Jembatan, Pasar, Pertanian dan Irigrasi Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, sebagai berikut (Chabib Soleh, 2014: 112) : a. Partisipasi dalam proses perencanaan. b. Partisipasi dalam pelaksanaan. c. Partisipasi dalam pemanfaatan (Mengawasi). d. Partisipasi dalam mengevaluasi

2.6 Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam kepemimpinan, hendaknya diletakkan dalam tugas (muamalah) kehidupan dan pengabdian (ibadah) setiap manusia sebagai kahlifah di bumi-Nya, Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 129.



قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : Mereka (kaum Musa) berkata, "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." (Musa) menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi; maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu." (QS. AL-a'raf : 129)

Dalam kenyataannya, situasinya seringkali berbeda jauh dan tidak selalu sejalan dengan konsep ideal tentang kekuasaan yang diperkenalkan oleh Islam melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, yang menegaskan bahwa kekuasaan adalah suatu amanah. Islam adalah agama menyeluruh, yang tidak hanya mengatur cara manusia beribadah kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, termasuk tata cara hidup berkomunitas, pendidikan, serta tata negara dan kepemimpinan. Leader dalam Islam telah diatur oleh hukum Syari'at Islam. Setiap individu manusia dianggap memiliki peran sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (seperti pemimpin umat atau pemimpin negara) maupun dalam tingkatan yang lebih sederhana, seperti pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan keterampilan yang khusus, dan kepemimpinan tidak dapat dijalankan hanya dengan kemampuan yang terbatas. Tidak peduli dalam tingkatan apa, kepemimpinan yang tidak memadai dapat menimbulkan ketidakstabilan di antara orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu tanggung jawab yang besar karena dianggap sebagai amanah dari Allah, dan kualitas kepemimpinan dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan pemimpin itu sendiri. Dalam konteks ini, ada dua peran yang signifikan, yaitu peran yang dipimpin dan peran yang memimpin (imam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' AlRasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Alqur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Pada skala yang lebih kecil kepemimpinan seorang kepala desa juga diatur oleh prinsip-prinsip agama yang mencakup keadilan, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban. Al-Quran memberikan pedoman dan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti oleh pemimpin, termasuk kepala desa. Salah satu dalil Al-Quran yang relevan adalah ayat dari Surah An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Allah menyuruh kamu menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu berlaku adil."

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin, termasuk kepala desa, harus memenuhi tugas mereka dengan penuh keadilan dan menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka secara benar. Mereka harus mengutamakan kepentingan umum dan berlaku adil dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Selain itu, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, kepala desa dalam pandangan Islam diharapkan untuk menjadi teladan dalam menjalankan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mereka harus menjaga kepentingan masyarakat dan berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan dan kebaikan dalam kepemimpinan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan, referensi untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian, memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut tabel kajian terdahulu yang dijadikan acuan dan bahan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Penjelasan dan Hasil
1	Muhammad Ikhsan (2020)	KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PEMBANGUNAN DI DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR	Dari data dan uraian yang telah dibahas pada akhir bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) Cukup Baik. adapun fakta dan data yang mendukung penulis didalam menarik kesimpulan tersebut diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		KABUPATEN KAMPAR).	adalah sebagai berikut : 1. Terbukti peran seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya sangat penting dalam hal apapun terutama dibidang pembangunan. 2. Pembangunan desa akan maju dan berkembang apabila adanya seorang pemimpin yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga mampu mengeluarkan kebijakan yang baik. 3. Hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat harus terjaga. Sehingga akan terjadi hubungan kerja sama yang baik dalam memajukan Pembangunan Desa.
2.	Trisusanti Lamangida, Muh.Firyal Akbar, Hasna Hasan (2017)	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto	Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan kesimpulan adalah sebagai berikut : - Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa sebagai seorang motivator, fasilitator dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu fungsi ini harus dilaksanakan dan implementasikan oleh seorang kepala desa dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa. Selain itu kepala desa juga yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal.</p>
3.	<p>Asep Hermansyah, Rostiena Pasciana (2018)</p> <p>PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SINDANGLAYA KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT</p>	<p>Hasil dari analisis dan pembahasan tentang variabel X (kepemimpinan kepala desa) di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, menunjukkan skor yang diperoleh adalah 259,07 dengan interpretasi presentasi skor sebesar 79,71%, artinya bahwa kepemimpinan Kepala Desa Sindanglaya baik. Untuk indikator paling tinggi ada pada indikator menentukan program kerja, dengan skor sebesar 277 dan interpretasi presentasi skor sebesar 85,23%. Sedangkan untuk indikator yang paling rendah ada pada indikator keterlibatan bawahan dalam berbagai kegiatan, yang mempunyai skor 242 dengan interpretasi presentasi skor sebesar 74,46%. Hal ini dikarenakan Kepala Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam melibatkan bawahannya masih bersifat subjektif, karena masih ada desakandesakan orang terdekat dari Kepala Desa Sindanglaya untuk menempati</p>



jabatan tertentu. Sedangkan untuk variabel Y (pelaksanaan pembangunan fisik) di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, rata-rata responden menyatakan baik. Dikarenakan mendapatkan skor total sebesar 247,5 dan interpretasi persentasi skor 76,15%. Untuk skor tertinggi ada pada indikator menentukan rencana anggaran biaya untuk jenis pembangunan, yang mempunyai skor sebesar 271 serta interpretasi presentasi skor 83,38. Sedangkan skor terendah dalam variabel Y ini ada pada indikator pemberian pemahaman terhadap masyarakat dengan skor 241 dan interpretasi presentasi skor sebesar 74,15%. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh TPK Pembangunan Desa Sindanglaya melalui wawancara, bahwasanya setiap ada pelaksanaan pembangunan, swadaya masyarakat sekitar lokasi pembangunan kurang bahkan tidak ada. Dikarenakan masyarakat masih kurang memahami terkait pentingnya swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik Desa Sindanglaya yang berkualitas. Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, hasil dari uji statistik sebesar 63,8% dan sisanya 36,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk pengujian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>hipotesis penelitian ini, dilihat dari nilai hitung t sebesar 10,55 dan tabel t sebesar 1,998, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Dikarenakan nilai hitung $t \geq$ daripada tabel t dengan tingkat korelasi sebesar $r = 0,799$ dan taraf signifikan sebesar 5% atau $\alpha = 0.05$. Artinya bahwa variabel X (kepemimpinan kepala desa) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (pelaksanaan pembangunan fisik) di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.</p>
4.	Armansyah, Yurianto (2022)	PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI RIAU	<p>Sesuai dengan tugas kepala desa sebagai fasilitator di masyarakat baik dalam hal yang positif dan negatif terlaksana dengan baik dan lancar. Masih ada saja terdapat kendala-kendala dalam hal pelaksanaannya hal ini sangat wajar karena dan itu semuanya bisa diatasi dengan baik. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai mediator dalam menggerakkan masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Mahato dikategorikan baik terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan hasil-hasil pembangunan fisik. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk swadaya. Kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai motivasi pembangunan serta aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Dalam menjalankan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan dengan baik dengan cara melibatkan peran pengusaha Daerah dan Perusahaan disekitar desa Mahato. Kepala Desa seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan dan bisa dikelola dan dijaga secara Bersama sama. Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai motivator di mana Kepala Desa selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada warga dan aparatur pemerintah di kantor desa, selain dari pada itu kepala desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat desa. Peran kepala Desa sebagai mobilisator Yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa serta mengelola pembangunan desa. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah Desa semua itu di lakukan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di Desa dan agar warga Desa Mahato terbiasa akan kegiatan-kegiatan desa yang bersifat positif.</p>
5.	Eka Aprita Rati, Umi Chotimah, Alfiandra	<p>PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MASYARAKAT
DALAM
PEMBANGUNAN
DESA DI DESA
SAKO MAKMUR
KECAMATAN
SEMBAWA
KABUPATEN
BANYUASIN**

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kedua variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis statistik menggunakan uji regresi linier sederhana, diperoleh nilai signifikansi = .000. Angka ini lebih kecil dari nilai α yaitu, $\alpha = .05$ (signifikansi 95%) atau dengan kata lain $\text{sig. } 000 < \alpha = .05$. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan “terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Sako Makmur kecamatan Sembawa kabupaten Banyuasin” dapat terbukti atau dengan kata lain H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga apabila kepemimpinan kepala desa yang demokratis ditingkatkan, maka kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkat pula. Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti menyarankan bagi kepala desa diharapkan dapat mempertahankan kepemimpinannya yang demokratis bahkan lebih baik ditingkatkan lagi kualitasnya, dengan cara lebih sering mengadakan kegiatan musyawarah desa, menerima saran dan ide yang diberikan oleh masyarakat dan bagi masyarakat diharapkan masyarakat hadir dan menyumbangkan idenya dalam

			musyawarah desa agar memperoleh hasil yang memuaskan.
--	--	--	---

Sumber : Beberapa Jurnal Ilmiah

2.8 Konsep Operasional

Operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Berikut konsep operasional dan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Tabel 2.2 Tabel Konsep dan Indikator Penelitian

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Kepemimpinan, Thoha (2010:52)	Inovator	1. Melakukan inovasi media penyampaian informasi desa. 2. Kemampuan mengkonsep setiap program pembangunan dengan baik agar dapat terealisasi.
		Komunikator	1. Kemampuan kepala desa dalam menyampaikan Pesan informasi terkait rencana program dan pembangunan desa kepada masyarakat. 2. Kemampuan kepala desa dalam memahami, mengerti maksud dan keinginan masyarakat.
		Motivator	1. Kemampuan kepala desa mendorong masyarakat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

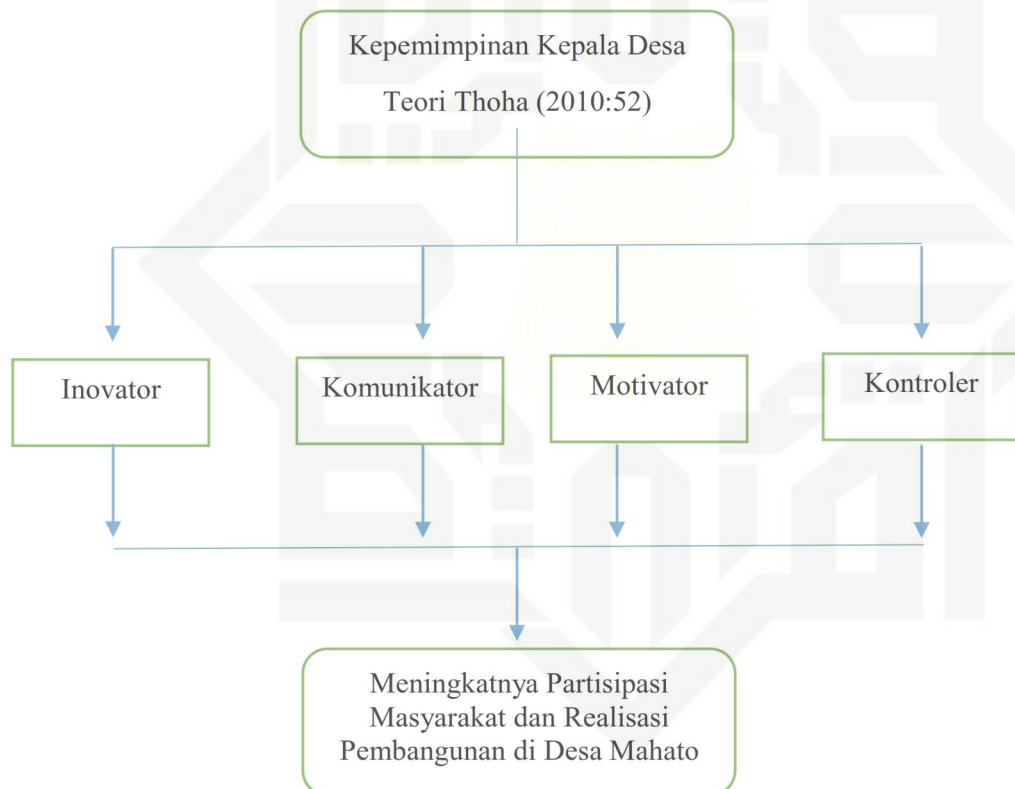
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		berpartisipasi dalam setiap musyawarah, program kerja dan pembangunan desa
	Kontroler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap program dan rencana pembangunan yang dibuat. 2. Kemampuan kepala desa dalam memanfaatkan sumber daya demi kepentingan pembangunan.

2.9 Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Mahato, yang terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2023 hingga Agustus 2023.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang bersangkutan benar-benar mengetahui kondisi di lapangan. Dalam hal ini untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dan merasakan kepemimpinan kepala Desa Mahato.
2. Data Sekunder, merupakan data pelengkap dari data primer. Biasanya berupa tulisan atau dokumentasi yang mendukung penelitian seperti arsip, dokumen, laporan tertulis, data dari narasumber maupun dari internet (Laliani, 2017:793). Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publikasi ilmiah, artikel jurnal dan literatur lain untuk menyempurnakan penelitian mengenai kepemimpinan kepala Desa di Mahato.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan suatu fenomena. Informan penelitian dapat berwujud individu, objek, atau organisasi. Dalam menentukan informan penelitian untuk penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan informan kunci (key informants). Pendekatan ini digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan kunci dan berperan penting dalam menyediakan informasi pokok yang relevan dalam penelitian. Informan kunci dipilih karena keahlian dan kapasitas mereka untuk memperkuat sumber data dalam konteks penelitian ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Firiadi	Kepala Desa	SMA Sederajat	1
2.	Azali	Sekdes	S1	1
3.	Jumadi	Staff Desa	SMA	1
3.	Indra Suyanto	Kepala Dusun	SMA Sederajat	1
4.	Selamet	Staff BPD	SMA Sederajat	1
5.	Risky	Pemuda	SMA Sederajat	1
6.	Sulaiman	Masyarakat	SMA Sederajat	1
7.	Andi	Masyarakat	S1	1
9.	Tino	Masyarakat	SD Sederajat	1
10.	Tandi	Masyarakat	S1	1

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah dialog dengan tujuan yang telah dikhususkan untuk mengetahui informasi mengenai persoalan tertentu. Percakapan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh dua arah yakni pewawancara yang memberikan pertanyaan kemudian yang diwawancarai akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa Mahato.

2. Observasi yaitu proses pengamatan secara langsung tentang objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan melengkapi data-data yang diperlukan berkenaan dengan topik penelitian.
3. Dokumentasi adalah dengan mengambil gambar yang ada di lingkungan sekitar dan komentar informan melalui handphone untuk memperoleh data yang akurat. (Sianipar,2017:33).

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles Dan Huberman Sugiyono (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber penelitian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan teknik dokumentasi selama prosedur.

2. Reduksi Data

Reduksi data terdiri dari meringkas, mengidentifikasi komponen kritis, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang dipadatkan akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan



peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan. Setiap peneliti diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai sambil meminimalkan data. Temuan adalah fokus utama penelitian kualitatif. Dengan data yang ditemukan di lokasi penelitian dan selama proses penelitian kemudian data tersebut disederhanakan. Setelah itu langkah selanjutnya dengan memasukkan data-data yang mendukung proses pembahasan penelitian. Sehingga data tersebut mengarah pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, penulisan naratif paling sering digunakan untuk menyediakan data dari studi kualitatif oleh Miles dan Huberman. Disarankan pula dalam menampilkan data, selain berbentuk prosa naratif, juga dapat berbentuk grafik, matriks, jaringan, dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Laporan awal tetap bersifat sementara dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan yang disajikan di awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Temuan dalam penelitian kualitatif yang belum pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan sebelumnya disebut kesimpulan. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas kepastiannya, sehingga sekarang terbukti sebagai hasil studi, hubungan kausal atau interaksi, hipotesis, atau teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km dari Ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat.

Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai “Teratak Air Hitam” yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah yaitu wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun). Kerajaan-kerajaan tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai, kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam sukudan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang kabau, Sunda, Batak dan masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu suku Bonai, dan suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK".

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100^o -101^o 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km². Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangun Purba
- b. Kecamatan Kabun
- c. Kecamatan Kepenuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- d. Kecamatan Kunto Darussalam
- e. Kecamatan Rambah
- f. Kecamatan Rambah Hilir
- g. Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rokan IV Koto
- i. Kecamatan Tambusai
- j. Kecamatan Tambusai Utara
- k. Kecamatan Tandun
- l. Kecamatan Ujungbatu
- m. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- n. Kecamatan Bonai Darussalam
- o. Kecamatan Kepenuhan Hulu
- p. Kecamatan Pendalian IV Koto

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 152.223,01 Ha (17,86 persen) diikuti oleh Kecamatan Tambusai Utara 129.470,70 Ha (15,19 persen), Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 99.867,87 Ha (11,72 persen), Kecamatan Tambusai 70.013,01 Ha (8,22 persen).

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi

Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Misi

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketagwaan.
- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dan desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan tnfrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan
- 5) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

4.2 Gambaran Umum Desa Mahato

4.2.1 Deskripsi Desa Mahato

Mahato merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Sejarah adanya Desa Mahato dimulai sejak tahun 1980, pada saat itu Desa ini masih berstatus Desa Mahato yang berasal dari hasil pemekaran Desa Tambusai Utara dengan Kepala Desanya Parlaungan Siregar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1989 terjadilah pertama kalinya pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa secara demokratis. Pada masa kepemimpinan Ahmad, AS terjadilah mobilitas Penduduk terutama dari Provinsi Sumatera Utara ke Desa Mahato untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan usaha membuka hutan untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Karet. Kepala desa tersebut membentuk Desa ini menjadi 6 (enam) Dusun yaitu, Dusun I Kuala Mahato, Dusun II Rio Makmur Dusun III Mompa, Dusun IV Bandar Selamat, Dusun V Sidodadi, dan Dusun VI Riau Damai. Selanjutnya sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai sekarang dijabat oleh Firiadi yang telah masuk

periode kedua masa jabatannya, dengan jumlah penduduk terbanyak juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Medan, Mahato Sakti dan Desa Tambusai Utara

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Desa Tambusai Utara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Wilayah desa dilintasi jalan pemukiman dengan total 18 Km, dua sungai yaitu sungai Mahato dan sungai Batang Kumu. Kontur tanah berbukit, struktur tanah hitam bervariasi, tekstur tanah liat dan pasir, curah hujan 24,05 mm, suhu rata - rata 35°C. Jarak ke ibu kota Kecamatan 15 Km, ke ibu kota Kabupaten 80



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Km, ke ibu kota Propinsi 267 Km, dan luas wilayah desa Mahato ±113 KM² dibagi dengan beberapa bagian yaitu :

Luas Pemukiman Penduduk Desa Mahato : 519 Ha/M²

Luas Perkebunan Penduduk : 10.881 Ha/M²

Luas Lahan Palawijo : - Ha/M²

Kelembagaan-kelembagaan yang berada dimasyarakat pun cukup berkembang dan bervariasi mula dari lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hubungan diantara tiga lembaga ini cukup dinamis dan sinergis. Lembaga-lembaga lainpun cukup berkembang, seperti PKK, Wirid Yasin, Karang Taruna, Organisasi Bela diri, dan lain-lain.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintahan Desa Mahato telah mencapai beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan baik berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pembinaan kemasyarakatan.

4.2.2 Kependudukan Desa Mahato

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada Dataran Tinggi, terdiri dari 9 (sembilan) Dusun, 55 (lima puluh lima) Rukun Warga dan 112 (seratus dua belas) Rukun Tetangga. Penduduk Desa Mahato yang berjumlah 27.076 jiwa mayoritas berdasarkan sensus yang dilaksanakan BPS Tahun 2010 yang tersebar dalam 9 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 : Dusun di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara

No	Dusun			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dusun I Kuala Mahato	1678	2289	3967
2.	Dusun II Rio Makmur	1502	1594	3096
3.	Dusun III Mompaa	1420	1542	2962
4.	Dusun IV Bandar Selamat	1438	1614	3052
5.	Dusun V Sidodadi	1457	1531	2988
6.	Dusun VI Riau Damai	1423	1587	3010
7.	Dusun VII Pasir Putih	1511	1576	3087
8.	Dusun VIII Jadi Makmur	1465	1494	2959
9.	Dusun IX Suka Jaya	1509	1450	2959
	Total	13.655	13.421	27.076

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2023

4.2.3 Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Mahato masih mengayomi azas gotong-royong dalam arti kata, bahu membahu dan bekerjasama dalam membangun desanya dan penduduk Desa Mahato dihuni berbagai macam suku yang diantaranya suku Melayu, suku jawa, suku sunda, suku batak, suku minang, dan suku mandailing. Adapun agama mayoritas menganut agama isiam namun secara sosial warga masyarakat Desa Mahato mayoritas berasal dari Pulau Sumatra dan Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Melayu, jawa, Batak dan Bahasa Nasional. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti Pencat Silat, kuda lumping, jaipongan, dan Tari Tor-Tor dsb.



Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat Desa Mahato sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Interaksi sosial pun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.

4.2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Mahato

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan APBDES
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun fungsi dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- g. Pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- h. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- j. Pelayanan kepada masyarakat.
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

4. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- a. Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- b. Membantu membina perekonomian Desa.
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d. Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya. Adapun fungsi dari Kepala Dusun ialah sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa

7. Badan Permusyawaratan Desa

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun tugas dari

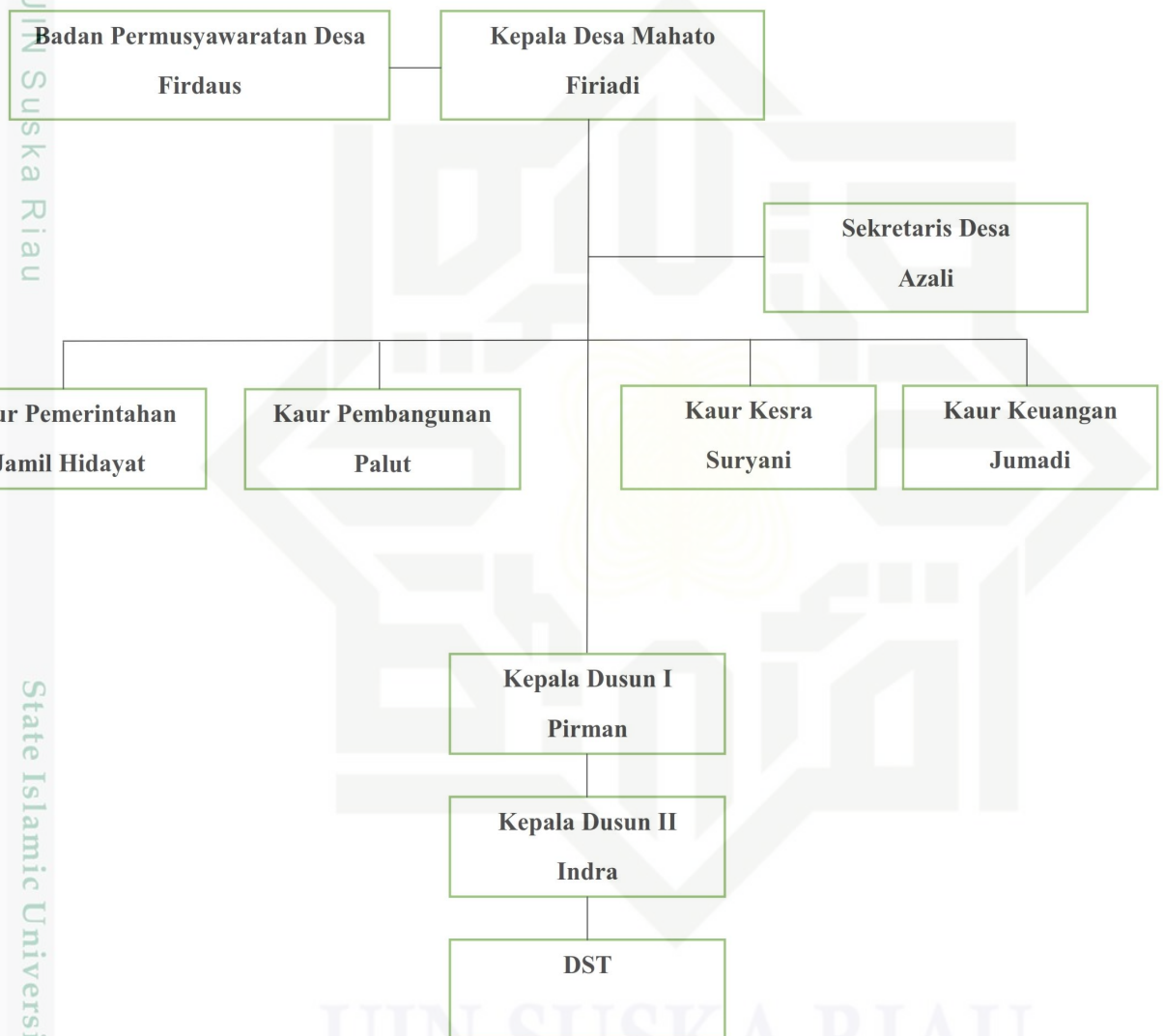
BPD adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Kantor Desa Mahato, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kepemimpinan inovatif dalam kepala desa memiliki dampak signifikan pada kemajuan dan tujuan yang ingin dicapai oleh desa Mahato. Kepala desa Mahato telah melakukan beberapa inovasi dalam program dan kegiatan, seperti pemangkasan birokrasi, pengurangan biaya administrasi, dan pendirian pondok tahfidz. Penggunaan media sosial, baliho, turun ke lapangan, dan majelis talim telah menjadi bagian dari strategi inovasi kepala desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, masih ada beberapa kendala dalam pengaksesan informasi oleh masyarakat terkait program kerja dan pembangunan desa dan masih ada kesenjangan dalam menjangkau seluruh masyarakat desa Mahato. Masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan detail, serta menginginkan aksesibilitas yang lebih baik terhadap informasi desa.

Komunikasi juga merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang baik dalam sebuah organisasi, termasuk di tingkat desa seperti Desa Mahato. Komunikasi yang efektif antara kepala desa dan masyarakat sangat penting untuk menyampaikan informasi terkait dengan program kerja, pembangunan, dan anggaran desa. Meskipun terdapat upaya seperti penggunaan baliho dan komunikasi melalui media sosial, masih ada kekurangan dan kendala dalam komunikasi ini. Salah satu kendala adalah ketidakmerataan informasi, terutama baliho yang hanya terletak di dusun satu dan penggunaan media sosial pribadi bukan media sosial pemerintah desa. Ini menunjukkan perluasan akses ke



informasi yang tidak merata. Kemudian, ketidakjelasan dalam alur informasi di tingkat perangkat desa juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Kepala Desa juga memiliki peran penting sebagai motivator yang harus memberikan dorongan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, ada kesenjangan antara klaim tingkat partisipasi yang diundang dari pemerintah desa dan tingkat kehadiran sebenarnya dalam musyawarah desa yang justru sangat rendah. Faktor-faktor seperti pekerjaan, jarak antar dusun, pola pemukiman, dan kondisi akses jalan yang buruk menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Meskipun undangan disampaikan secara tertulis, tingkat kehadiran masyarakat cenderung masih sangat rendah, bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah yang diundang dan kehadiran lebih di dominasi oleh masyarakat dusun satu kuala mahato sehingga berdampak pada usulan program dan pembangunan yang lebih banyak mengakomodir dan disepakati untuk wilayah dusun satu.

Pada indikator Kontroler dalam konteks pemerintahan desa adalah proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kebijakan desa untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kontrol ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara internal maupun eksternal. Kontrol dalam pemerintahan desa mahato melibatkan beberapa pihak, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, TNI/Polri, media, dan lainnya. Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan program dan pembangunan desa, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif. Kepala desa juga harus menerima kritik dan saran dari masyarakat serta memberikan respons yang baik terhadapnya.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kontrol di desa mahato, seperti kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, ketidakmampuan kepala desa untuk merencanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program yang dibuat oleh pemerintah desa. Dengan demikian, kontrol dalam pemerintahan desa bukan hanya tanggung jawab kepala desa, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat dan lembaga desa seperti BPD. Upaya kolaboratif ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan rencana dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci dan dalam rangka meningkatkan peran kepala desa terkait dengan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa mahato maka penulis memberikan saran untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat yang mengarah pada pembangunan desa yang lebih baik. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah :

1. Kepala desa mahato perlu melakukan pengembangan yang lebih baik dalam bidang inovasi dan manajemen. Pengembangan ini harus mencakup konsep, perencanaan, dan pelaksanaan program kerja dan pembangunan yang lebih terstruktur dan detail.



Kepala desa Mahato harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, forum terbuka, atau kelompok kerja bersama yang melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat.

Pemerintah desa mahato hendaknya membuat dan mengaktifkan website desa dan platform media sosial milik desa dan mengelolanya dengan baik untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat desa dan memastikan informasi di-update secara berkala.

Kepala desa mahato harus mendorong komunikasi terbuka dengan seluruh dusun yang ada di desa mahato dan lapisan masyarakat desa. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan terbuka, dialog, dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari warga desa secara keseluruhan dengan tidak berpusat pada satu titik atau dusun tertentu.

Pemerintah desa perlu mengagendakan musyawarah dan kegiatan pembangunan desa dengan mempertimbangkan jadwal dan kenyamanan masyarakat dan mempertimbangkan untuk melakukan musyawarah desa secara bergantian didusun lain.

Sebagai kontroler, kepala desa Mahato harus memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan BPD dan masyarakat. Melalui transparansi dalam pengelolaan dana dan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan, pengawasan dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih baik

Melakukan percepatan proses pemekaran desa Mahato dengan memastikan bahwa desa-desa persiapan segera menjadi desa definitif. Langkah ini akan membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi, termasuk pemerataan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tantangan geografi yang luas di desa Mahato. Dengan pemekaran yang lebih cepat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dapat meningkat, sehingga desa dapat lebih merata dalam menikmati manfaat dari pembangunan dan program-program pemerintah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS Al-A'raf ayat 129

QS An-Nisa ayat 58

Artikel Jurnal :

Agung Arishandy, B., & Sukmana, H. (2023). Collaborative Governance in the Permitted Literacy Village Program, Jabon District, Sidoarjo Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(2), 254–259. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1545>

Aisia, G. (2017). KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sri : *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*. <http://repository.radenintan.ac.id/1398/>

Ajamsaru, Y., Rorong, A. J., & Londa, V. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(41), 1–10.

Andarista, M. V., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v8i1.3019>

Andika, W. A., S, B. U., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(2).

Cambalikova, A., & Misun, J. (2017). The importance of control in managerial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

work. *University of Tirana, Faculty of Economy, Department of Economics, January, 217–228.* https://mpa.ub.uni-muenchen.de/83776/1/MPRA_paper_83776.pdf

Dilago, W. R., Lalomah, A., & Plangiten, N. N. (2019). Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Suatu Studi Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 5*(76), 69–78.

Ferlina, A. (2020). Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pongkok Kab. Klaten. *Skripsi, 135.* <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28406>

FREMIAS WENDA, BURHANUDDIN KIYAI, D. L. T. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Embangunan Masyarakat Desa Di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny. *Angewandte Chemie International Edition, 6*(11), 951–952., *1*(2013–2014), 32.

Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbm Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan, 17*(IX), 90–99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>

Hakim, arif rahman, Surya, I., & Hasana, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Ka Bupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan, 6*(3), 1111–1124.

Jamaludin, A. N. (2017). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. *Sosiologi Perkotaan, 2*(2), 474.

Kache, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik, 5*(80), 14–24.

Kozioł-nadolna, K. (2020). administrative sciences The Role of a Leader in Stimulating Innovation in an Organization. *Administrative Sciences, 10*(59),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1–18.

- Lamida, R. (2015). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Desa. *Politico*, 1(7), 1–14.
- Londa, V. Y., Ruru, J., & Onnoa, R. (2021). Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud Rutli. *Jurnal Administrasi*, 7(102), 43–52.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/34890/32716>
- Madani, M., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (n.d.). *PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP*. 4(April 2023).
- Muqsith, A. Al, Vestikowati, E., & Nursetiawan, I. (2022). *VISI MISI ORGANISASI (Studi Pada Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)*. 3393–3409.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Nutvi, A., Surabaya, U. B., Desa, K., Masyarakat, P., District, W., Head, V., Participation, C., & Development, V. (2022). Peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa di desa lebani suko wringinanom. *Jurnal Sosial*, 1(1–2), 1–10.
- Pang, A., Shin, W., Lew, Z., & Walther, J. B. (2018). Building relationships through dialogic communication: Organizations, stakeholders, and computer-mediated communication. *Journal of Marketing Communications*, 24(1), 68–82. <https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1269019>
- Podungge, R., & Monoarfa, M. A. (2019). Pengaruh Kepemimpin Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10(November), 109–116.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rakhmawati, I. (2016). Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 172–173. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tadbir>
- Rati, E. A., Chotimah, U., & Alfiandra, A. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten *Bhineka Tunggal Ika: Kajian ...*, 3, 71–80. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4603>
- Ridwan. (2013). *Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat)*.
- Rismayana, B. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 23–36.
- Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 652–657. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.652-657>

Undang-Undang :

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA
“MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA
MAHATO”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Inovator

- a. Apa ada inovasi yang dilakukan kepala Desa selama kepemimpinannya?
- b. Apa saja inovasi dan bagaimana penerapannya?
- c. Apakah ada inovasi terkait dengan penyampaian informasi desa kepada masyarakat?
- d. Media apa saja yang digunakan untuk menyampaikan informasi desa?
- e. Apakah hasil yang diperoleh jauh lebih baik dari sebelum inovasi itu dibuat?
- f. Apakah desa memiliki website khusus yang dirancang untuk mengupload segala bentuk kegiatan dan informasi desa?
- g. Secara umum bagaimana kepala desa menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat?
- h. Dari keseluruhan program, pembangunan dana dan lain-lain yang kita tahu bahwa itu harusnya terbuka, apakah masyarakat bisa mengakses keseluruhan informasinya?
- i. Melalui apa masyarakat dapat mengakses informasi?
- j. Terkait dengan program kerja dan pembangunan yang ada ini bagaimana cara bapak mengkonsep agar dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik?
- k. Apakah masyarakat dilibatkan dalam mengkonsep program kerja dan pembangunan yang ada di desa?
- l. Biasanya mengkonsep program kerja dan pembangunan itu dengan cara apa pak? Diskusi, musyawarah atau dengan keputusan secara langsung?

b. Komunikator

- a. Apakah ada komunikasi yang bapak lakukan terhadap masyarakat?
- b. Secara umum biasanya bagaimana cara bapak berkomunikasi dengan masyarakat?
- c. Biasanya media apa yang bapak gunakan untuk berkomunikasi? Apakah secara langsung atau ada media lain yang digunakan?
- d. Apakah ada kendala yang bapak hadapi saat melakukan komunikasi dengan masyarakat?
- e. Biasanya terkait hal apa saja yang bapak komunikasikan?
- f. Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi program dan pembangunan desa?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Seperti apa alur komunikasinya? Apakah bapak secara langsung atau melalui staf dibawah bapak?
- h. Jika secara langsung biasanya seperti apa komunikasi tersebut?
- i. Jika melalui staf bagaimana biasanya bapak mengarahkan agar pesan informasi yang hendak di sampaikan itu maksimal dan tersampaikan dengan baik?
- j. Apakah pesan informasi yang di sampaikan itu berjenjang dari kepala Desa ke staff kemudian perangkat yang ada dibawahnya atau bagaimana?
- k. Apakah juga ada upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa?
 - l. Dalam bentuk apa? Apakah Musyawarah atau ada hal lain?
- m. Apakah ada kegiatan musyawarah rutin yang dilakukan pemerintah desa yang melibatkan masyarakat?
- n. Jika ada apa saja bentuk musyawarah nya?
- o. Biasanya kapan musyawarah itu dilaksanakan? Apakah jadwal atau kalender program kerja atau musyawarah sudah di tentukan sehingga masyarakat tahu bahwasanya ditanggal tersebut ada musyawarah?
- p. Bagaimana biasanya cara yang dilakukan untuk mengajak masyarakat agar hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah tersebut?
- q. Apakah menggunakan sistem undangan tertulis, pengumuman atau lisan?
- r. Dari beberapa musyawarah yang dilaksanakan bagaimana tingkat kehadiran masyarakat?
- s. Apa langkah pemerintah desa untuk agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat?
- c. Motivator**
 - a. Bagaimana peranan kepala desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan ?
 - b. Motivasi Seperti apa yang biasanya bapak berikan?
 - c. Bagaimana upaya yang kepala desa lakukan untuk menggerakkan masyarakat agar terlibat secara langsung di dalam pembangunan?
 - d. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat didalam perencanaan pembangunan yang ada di desa mahato?
 - e. Apa yang menjadi ukuran bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan pembangunan di mahato itu cukup tinggi?
 - f. Apa saja contoh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program dan pembangunan desa?
 - g. Apakah keterlibatan masyarakat dalam perencaan program dan pembangunan itu sesuai harapan? Apa ukurannya?
 - h. Apa saja contoh keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan pembangunan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Apakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan pembangunan itu sesuai harapan? Apa ukurannya?
 - j. Apa saja contoh keterlibatan msyarakat dalam evaluasi program dan pembangunan desa?
 - k. Apakah keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program dan pembangunan itu sesuai dengan yang diharapkan? Apa ukurannya?
 - l. Selain program kerja dan pembangunan, apakah ada kegiatan lain yang melibatkan masyarakat? Gotong royong misalnya. Apa saja bentuknya?
 - m. Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk hadir disana?
 - n. Bagaimana tingkat kehadiran masyarakat jika di banding dengan jumlah penduduk atau KK yang ada?
 - o. Apa biasanya yang melatarbelakangi masyarakat tidak hadir dalam kegiatan tersebut?
 - p. Bagaimana cara bapak memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong tersebut dan menyadarkan bahwasanya hal ini penting?
 - q. Bagaimana sistem kegiatan gotong royong itu dilaksanakan?
 - r. Apakah terjadwal atau kalau ada pemberitahuan saja?
 - s. Apakah ada alternatif atau upaya lain yang dilakukan oleh kepala desa dan pemerintah desa untuk menarik minat masyarakat agar terlibat langsung dalam program dan pembangunan desa atau kegiatan yang lain?
 - t. Bagaimana cara kepala desa berkomunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilakukan ?
- d. Kontroller**
- a. Dari program kerja dan pembangunan yang sudah dibuat bagaimana upaya kepala dalam mengontrol serta mengawasi semuanya agar dapat terlaksanakan dengan baik?
 - b. Apakah kepala desa memiliki kepercayaan untuk mengontrol dan mngawasi sendiri program kerja dan pembangunan yang dibuat?
 - c. Aatau apakah ada pihak lain yang membantu kepala desa dalam mengontrol dan mengawasi program kerja dan pembangunan dilapangan agar terlaksana dengan baik?
 - d. Secara pribadi biasanya bagaimana kepala desa mengontrol dan mengawasi program kerja dan pembangunan yang telah dibuat?
 - e. Apakah pelaksanaan atau eksekusi dilapangan itu semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan? Contohnya apa dan apa ukurannya?
 - f. Apakah masyarakat dilibatkan dalam mengawasi program kerja dan pembangunan yang di buat? Dalam bentuk apa keterlibatan masyarakat itu?
 - g. Apakah masyarakat cukup aktif dalam mengawasi setiap program kerja dan pembangunan yang dibuat?

- h. Kritik dan saran kan bagian dari bentuk pengawasan dan kontrol, bagaimana bapak menyikapi terkait hal tersebut dan apakah bapak cukup terbuka dengan itu?

Lampiran 2 :

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa Mahato



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Mahato



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mahato



Wawancara dengan Kepala Dusun 2 Rio Makmur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Staff BPD Desa Mahato



Wawancara dengan Masyarakat Desa Mahato

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat desa Mahato



Wawancara dengan Masyarakat Desa Mahato

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Masyarakat desa Mahato

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1656/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 15 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
Yth. Dr.Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Wahyu Kurniawan
NIM : 11970510666
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM 15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2195/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023 Pekanbaru, 07 Maret 2023 M
Sifat : Biasa 14 Sya'ban 1444 H
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Kepada
Yth. Kepala Desa Mahato
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wahyu Kurniawan
NIM. : 11970510666
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3011/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 26 Mei 2023 M
Sifat : Biasa 6 Zulqaidah 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Wahyu Kurniawan
NIM : 11970510666
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2987/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 25 Mei 2023 M
 5 Zulqaidah 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa
 Mahato Tambusai Utara
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wahyu Kurniawan
 NIM. : 11970510666
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
DESA MAHATO

Alamat : Jln. Lintas – Bagan Batu – Dalu - Dalu – Kuala Mahato Kode Pos : 28558

Mahato, 19 Juni 2023

Nomor : 470 /SG/ / Pem-Mt / VI / 2023
 Lampiran : -
 Hal : Memberikan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Di-
 Pekanbaru

Menindak lanjuti Surat Izin Riset Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : B-2987/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2023 Tanggal 25 Mei 2023 dengan perihal "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". Prariset atas nama :

Nama : WAHYU KURNIAWAN
 NIM : 11970510666
 Program Studi : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Mahato KM 17 – Desa Mahato

Demikianlah prihal ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA MAHATO



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
DESA MAHATO

Alamat : Jln. Lintas – Bagan Batu – Dalu - Dalu – Kuala Mahato Kode Pos : 28558

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 591 /PEM-MT/ VII /2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRIADI**
 Lembaga : Pemerintahan Desa
 Jabatan : Kepala Desa Mahato

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i bernama :

1. Nama : **WAHYU KURNIAWAN**
 Nim : 11970510666
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Benar nama Tersebut diatas Telah Selesai melaksanakan Penelitian di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Mahato, 26 Juni 2023
 Kepala Desa Mahato


FIRIADI

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wahyu Kurniawan, lahir pada tanggal 07 Desember 2000 di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah desa kecil yang bernama Mahato. Penulis merupakan anak ketiga (3) dari tiga (3) bersaudara yang terlahir dari kedua orang tua yang begitu hebat, yaitu Ayah yang bernama Ngadino dan Ibu yang bernama Warsinah. Penulis bersuku Jawa, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 017 Tambusai Utara pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tambusai Utara yang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambusai Utara dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur PMB Undangan Mandiri.

Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam beberapa organisasi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Di antaranya adalah Forum Diskusi Ekonomi Islam UIN Suska Riau (ForDEI), Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Tengah (FoSSEI Sumbagteng), Rohis ISC Al-Iqtishodi FEIS UIN Suska Riau, Himpunan Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara, dan Study Club Dinamika Publik Administrasi Negara (SCDP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penulis juga berperan aktif dalam dunia penulisan dengan menulis artikel opini dan beberapa artikel ilmiah. Beberapa kali penulis mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dengan menulis untuk website Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam beberapa kegiatan. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan penelitian bersama salah satu Dosen Administrasi Negara, yaitu Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. Keanggotaan dalam berbagai organisasi dan keterlibatan dalam dunia penulisan serta penelitian telah membantu penulis mengembangkan kemampuan sosial, intelektual, dan profesional selama masa perkuliahan. Penulis yakin pengalaman ini akan sangat bermanfaat dalam perjalanan karier dan kehidupan di masa depan.

Pada semester 5, penulis memiliki kesempatan berharga untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Kantor ini berlokasi di Jl. Ponegoro No.29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Selama PKL, penulis mendapatkan pengalaman berharga dalam dunia kerja dan kontribusi terhadap pengelolaan zakat di tingkat provinsi. Selanjutnya, penulis juga berkesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Selama KKN, penulis berpartisipasi aktif dalam program-program pengabdian masyarakat di desa tersebut, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua pengalaman ini telah memperkaya wawasan penulis dalam praktik dunia nyata di berbagai bidang, baik dalam aspek profesional maupun pelayanan kepada masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan lancar, dimana salah satu pencapaian terpenting adalah menyelesaikan skripsi berjudul **"MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA DESA di DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU."** Skripsi ini dibimbing oleh Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga selama proses penulisan. Pada tanggal 19 Oktober 2023, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana sosial (S.Sos). Keberhasilan ini didapatkan setelah melewati Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Prestasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pendidikan penulis, yang menunjukkan dedikasi dan upaya keras dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana. Selain itu, skripsi dan ujian akhir ini juga menjadi bukti pencapaian intelektual yang menunjukkan pemahaman mendalam dalam bidang ilmu administrasi negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.